

Pemilu dan Perubahan Politik



Bayu Dardias

<http://bayudardias.staff.ugm.ac.id>

Universitas Negeri Jember , 22 Mei 2012

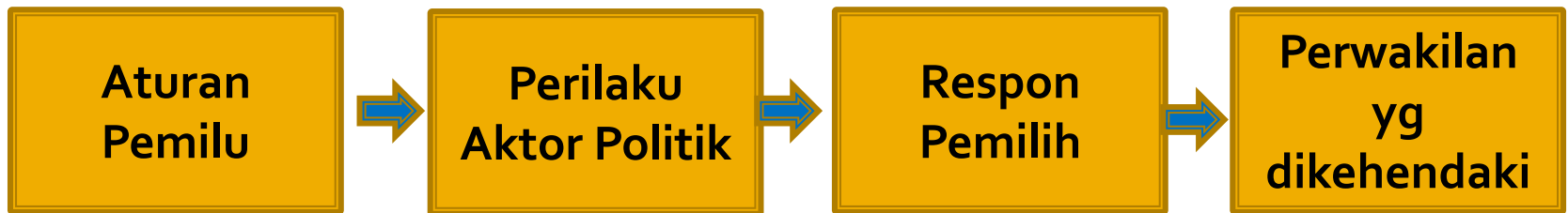
Outline

1. Kerangka Teoritik sistem Pemilu
2. Perubahan Rutin Lima Tahunan
3. Electoral Formula
4. District Magnitude
5. Ballot Structure
6. Sebaran Penduduk dan Kondisi Geografis
7. Threshold
8. Judicial Power
9. Perilaku Aktor Politik dan Perubahan Sistem Politik

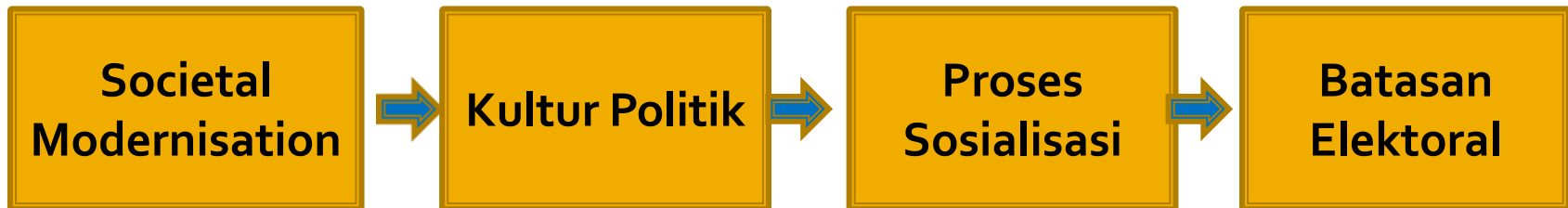
Kerangka Teoritik

- Dua Kubu Teoritik

1. Rational-Choice Institutionalism

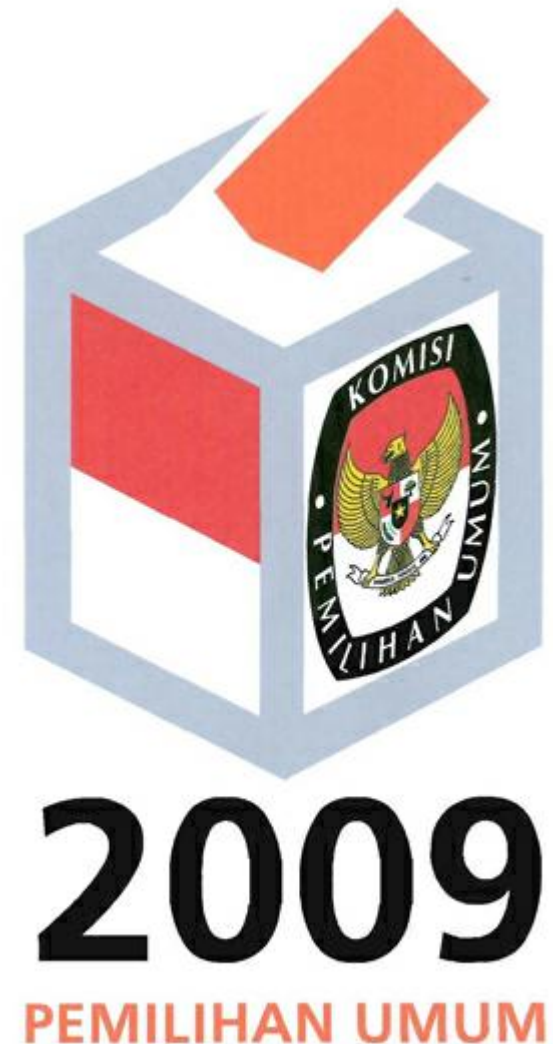


2. Cultural Modernisation Theory



Perubahan Lima Tahunan

- UU berubah, isunya tetap sama
- Terdapat perubahan dalam UU Pemilu, yang akan merubah strategi aktor politik
- Dampak UU baru thd sistem politik belum diketahui, tetapi kemungkinan tidak akan massive.



Electoral Formula

- Tidak ada penghitungan tahap ketiga.
- Hanya penghitungan tahap kedua utk sisa suara dan suara yang tidak mencapai BPP.
- Memperkecil kemungkinan ketidakpastian kursi
- Semakin tidak “proporsional”

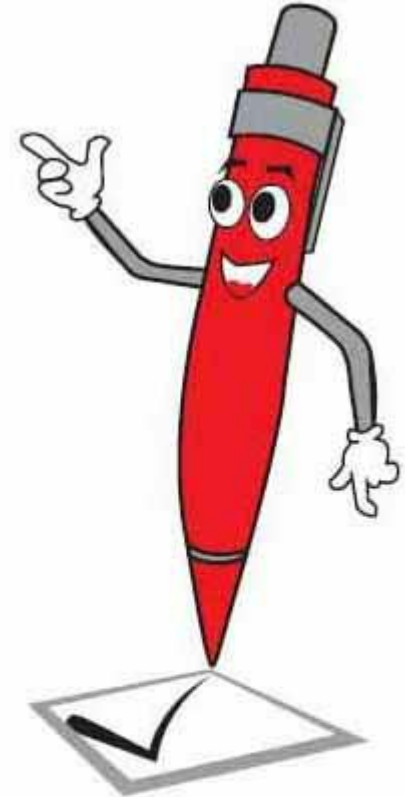


District Magnitude

- Semakin besar (semakin banyak caleg) semakin proporsional
- Sama dengan Pemilu 2009 DPR RI (3-10)
- Pada pembahasan disatukan dengan Parliamentary Threshold.
- Berbeda untuk DPRD dengan sub bagian administratif menjadi Dapil

Ballot Structure

- Proporsional Terbuka
- Contreng diganti Coblos
- Memilih satu kali
- Boleh memilih Partai, atau Kandidat.
- Suara Kandidat diperhitungkan, terlepas dari urutan Partai
- Kandidat akan berkampanye.
- Lambang Partai kecil, tdk sebanding dgn gambar kandidat



*Satu Suara
untuk Masa Depan!*



2009

ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT

DAERAH PEMILIHAN :

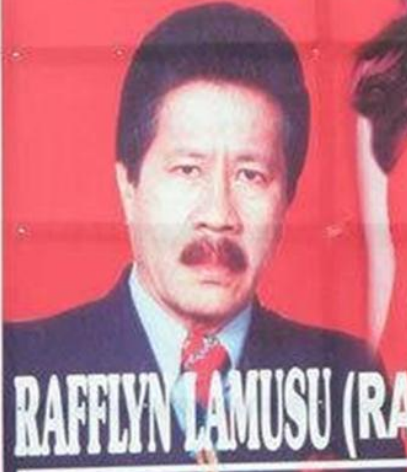
[illegible]



Ballot Structure

"RAKYAT BEBAS DARI BELENGGU PENDERITAAN & KETIDAKADILAN"

PPRN
4
PARTAI PEDULI RAKYAT NASIONAL



Cynthia

RAFFLYN LAMUSU (RAPI)

Papanya Cynthia Lamusu

CALEG NO. URUT 1 DAPIL KOTA SELATAN & TIMUR
DPRD KOTA GORONTALO

PUTRA ASLI KAMPUNG BUGIS

33



PARTAI
INDONESIA
SEJAHTERA



Sabaruddin

CALEG BALIKPAPAN TIMUR - UTARA

NO. URUT 1





FIRDAUS
007 BOND

FANS 7



email : firdaustop@yahoo.com

Korupsi...?
Kebodohan...?
Kemiskinan...?
PERANG...!!!!

CALEG DPR-RI
DAPIL BANTEN III

7. AHMAD FIRDAUS S.Ag

SESUNGGUHNYA orang-orang yang BERIMAN dan BERAMAL SHOLEH bagi mereka
adalah syurga FIRDAUS mengad' tempat tinggal. AL-KAHFI 107

Directed by D- Firdausy Picture

No. 43



DARI SABANG SAMPAI MERAUKE & DARI MIANGAS SAMPAI ROTE NDAO
KITA BERANTAS KORUPSI & PELANGGARAN HAK AZASI MANUSIA

INDONESIA PASTI JAYA

"SEBERSIH-BERSIH TAUHID, SETINGGI-TINGGI ILMU,
SEPANDAI-PANDAI SILAH"

...dan akan jadi terpuis dgn Spektakuler,
PARTAI DEMOKRAT

PARTAI DEMOKRAT

Design : BOZANE

"Sistem suara terbanyak / Bukan No. Urut"
Full Competition Fairness



10

ALAMAT: JALAN ...



MULTIPOLY™

Moham DDA
DAN DUKUNGANNYA
WALIMAH
ALWI SHIMAN

Bersama Uluu & Habiib Mendirikan Basmu
Wujudkan Islam Ramah & Tolera

CONTRENG No.12

YANG PAKE BAJU SATPAM

12 **SUBHAN**

Azas : Islam Ahlussunnah Waljama'ah

26



FEBUAR RAHMAN, SH
CALEG DPRD SUMSEL
DAIRY KOTA PALEMBANG
NOMOR URUT 1



Kerja atau Hidup Gratis

NO.1. RUSTANDI ADRIANSYAH

CALEG DPRD PALEMBANG
DAIRY KEMUNGKID 1, SUKAWATI, ALANG-ALANG LEMBI

Dampak Proporsional Terbuka

Positif

- Lebih Demokratis?

Negatif

- Tidak ada yang mau “bekerja” untuk partai, karena loyalitas tidak menjamin keterpilihan.
- Partai akan mencoba mencari figur dan Pemodal utk menghindari PT.
- Setelah terpilih, dihadapkan pada dua pilihan: menghadiri sidang DPR atau menemui konstituen?

Sebaran Penduduk

- Prinsip OPOVOV tidak berlaku di Indonesia.
- Sebaran penduduk yang tidak merata diharapkan diwakili DPD tetapi tidak terjadi.
- Suara Pemilih Jawa Bali jauh lebih rendah daripada Kalimantan Papua.



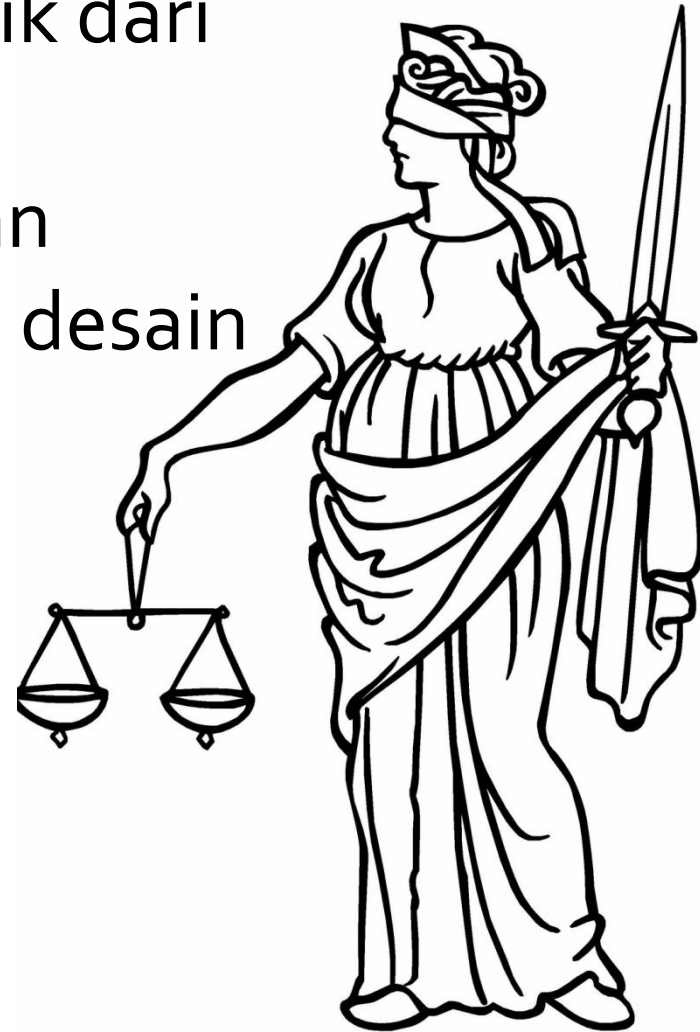
Threshold

- Electoral Threshold terbukti tidak efektif
- PT diberlakukan nasional.
- Partai tidak lewat 3,5% , suaranya tidak dihitung di semua level legislatif.
- Ancaman besar utk desain Proporsional.
- Mematikan partai kecil yang eksis di lokal kecuali Aceh.



Yudicial Power

- MK dapat merubah sistem politik dari yang sudah dihasilkan di DPR
- Memiliki prinsip dan perhitungan tersendiri yang “buta” terhadap desain electoral
- Tidak ada damage control.



Perilaku Politik

- Tokoh dan Pemodal akan mendominasi
- Perebutan Kandidat krn konsekuensi Merger Partai
- Incumbent diuntungkan
- Kandidat Perempuan kecil kemungkinan untuk meningkat.



UHERMAN

No.10

Coblos eh Contreng yach..

Perolehan Partai 1999-2009

Pemilu 1999

Partai Politik	Persentase suara (%)	Persentase alokasi kursi (%)
PDI-P	33,73	33,12
Golkar	22,43	25,97
Partai Persatuan Pembangunan	10,70	12,55
Partai Kebangkitan Bangsa	12,60	11,04
Partai Amanat Nasional	7,11	7,36
Partai Bulan Bintang	1,94	2,81
Partai Keadilan	1,36	1,52
Partai Mahdlatul Umat	0,64	1,08
Partai Demokrasi Kasih Bangsa	0,52	1,08
Partai Keadilan dan Persatuan	1,01	0,87
Partai Demokrasi Indonesia	0,62	0,43
Partai lain (10 partai, masing-masing satu kursi)	3,56	2,16
Partai lain (27 partai, tidak mendapat kursi)	3,77	0
Jumlah	100	100

Pemilu 2004

Partai Politik	Persentase suara (%)	Persentase alokasi kursi (%)
Partai Golkar	21,6	23,1
PDI-P	18,5	19,8
Partai Persatuan Pembangunan	8,2	10,6
Partai Demokrat	7,5	10,2
Partai Amanat Nasional	6,5	9,6
Partai Kebangkitan Bangsa	10,6	9,5
Partai Keadilan Sejahtera	7,3	8,2
Partai Bintang Reformasi	2,4	2,6
Partai Damai Sejahtera	2,1	2,4
Partai Bulan Bintang	2,6	2,0
Partai Persatuan Demokrasi Kebangsaan	1,2	0,7
Partai Pelopor	0,8	0,6
Partai Karya Peduli Bangsa	2,1	0,4
PNI Marhaenisme	0,8	0,2
Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	1,3	0,2
Partai Penegak Demokrasi Indonesia	0,8	0,2
Partai lain (8 partai, tidak mendapat kursi)	5,9	0
Jumlah	100	100

Pemilu 2009

Partai Politik	Perolehan Suara		Perolehan Kursi					
			Keputusan KPU		Keputusan MK		Putusan MA*	
	Jumlah	Persen	Kursi	Persen	Kursi	Persen	Kursi	Persen
Partai Demokrat	21.703.137	20,83	150	26,8	149	26,6	180	32,1
Partai Golkar	15.037.757	14,52	107	19,1	106	18,9	125	22,3
PDI-P	14.600.111	14,04	95	17,0	95	17,0	111	19,8
PKS	8.206.955	7,85	57	10,2	57	10,2	50	8,9
PAN	6.254.580	6,00	43	7,7	46	8,2	28	5,0
PPP	5.543.679	5,28	37	6,6	37	6,6	21	3,8
PKB	5.146.122	4,98	27	4,8	28	5,0	29	5,2
Gerindra	4.646.406	4,47	26	4,6	26	4,6	10	1,8
Hanura	3.922.870	3,78	18	3,2	16	2,9	6	1,1
29 partai yang tidak lolos "parliamentary threshold"	19.038.168	18,29	0	0	0	0	0	0

Keterangan: * hasil hitung-hitungan yang dilakukan oleh Cetro berdasarkan putusan MA
Sumber: Litbang Kompas, diolah dari Komisi Pemilihan Umum dan Cetro

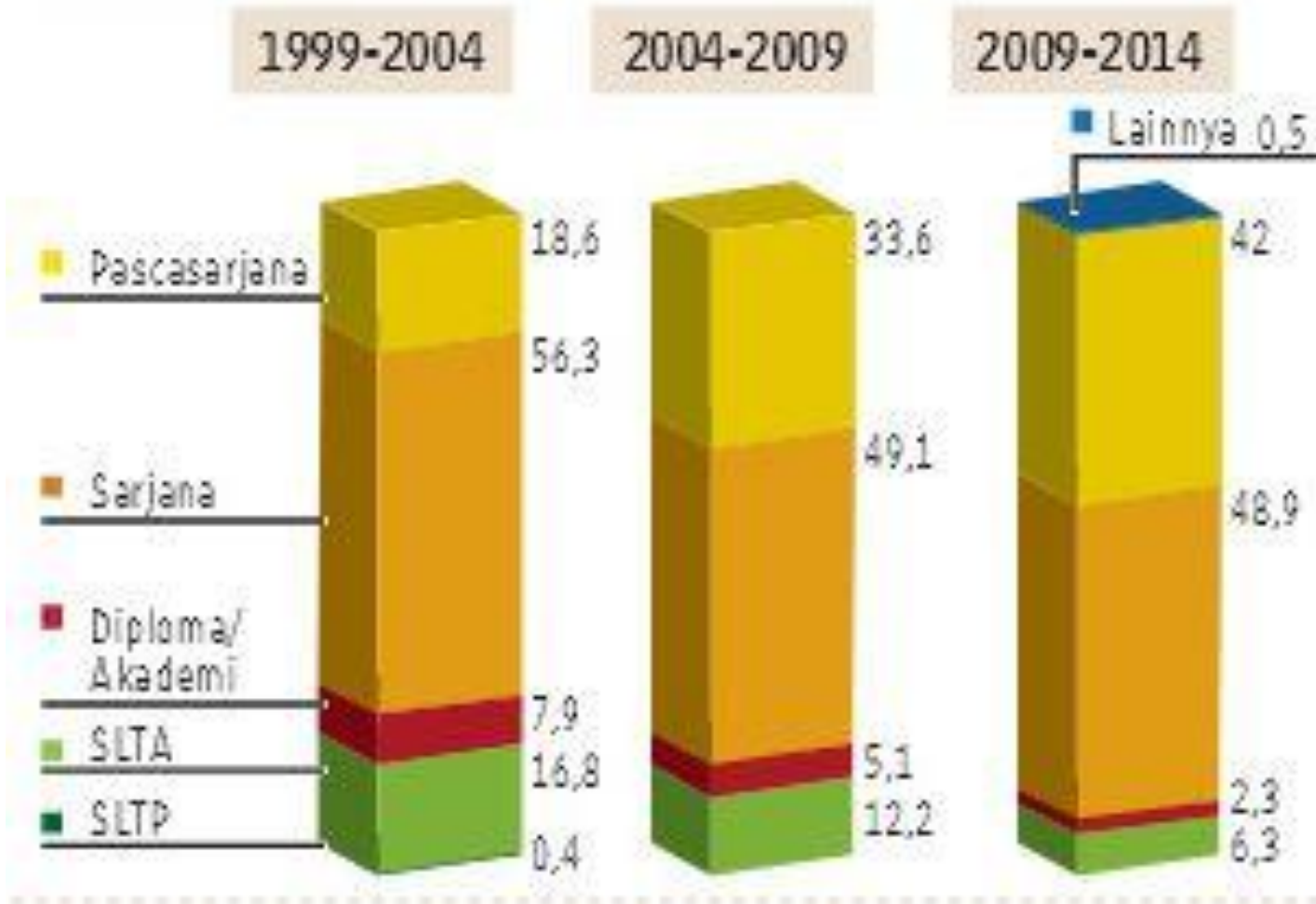
USIA 1999-2009

► Usia



TINGKAT PENDIDIKAN 1999-2009

► Pendidikan



JENIS KELAMIN 1999-2009



HASIL Pemilu 2009

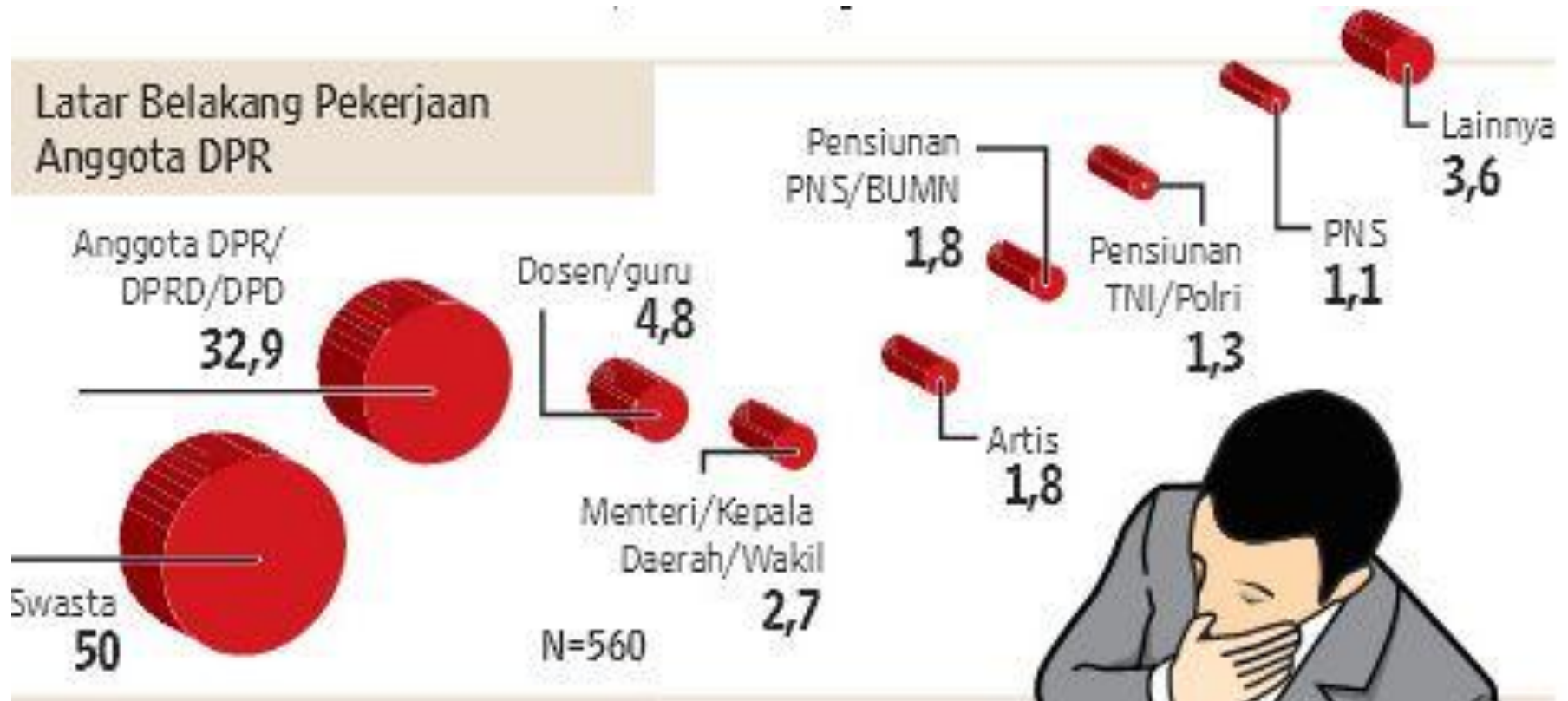
Komposisi Anggota DPR
Menurut Partai

Jumlah Total: 560

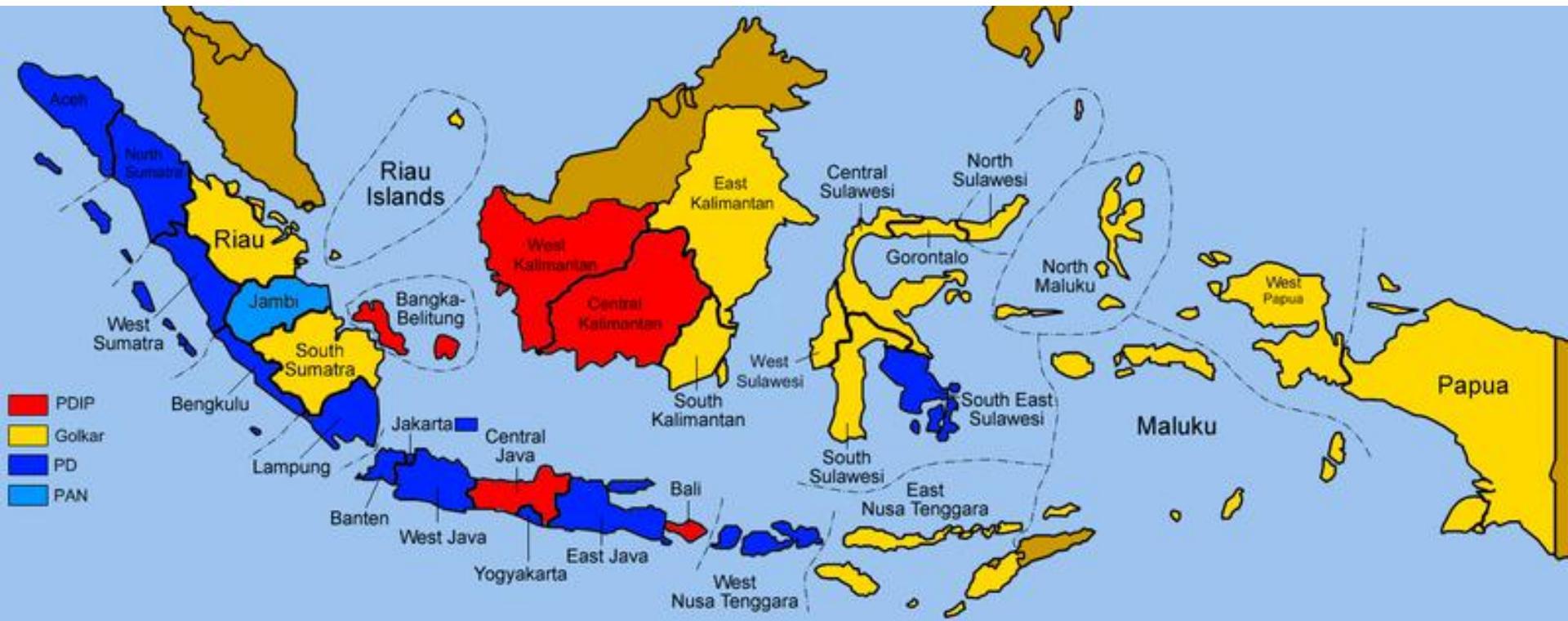


PEKERJAAN 2009

Latar Belakang Pekerjaan Anggota DPR



Sebaran dukungan 2009



Koalisi adl pilihan yang tak bisa dihindari

Koalisi Parpol Pendukung dan Tidak Mendukung Pemerintah

■ Koalisi Parpol Pendukung Pemerintah

Partai Demokrat

148

PKS

57

PAN

46

PPP

38

PKB

28

Golkar

106

Jumlah **423**

■ Parpol Belum Menentukan Sikap kepada Pemerintah

PDI-P

94

Gerindra

26

Hanura

17

Jumlah **137**



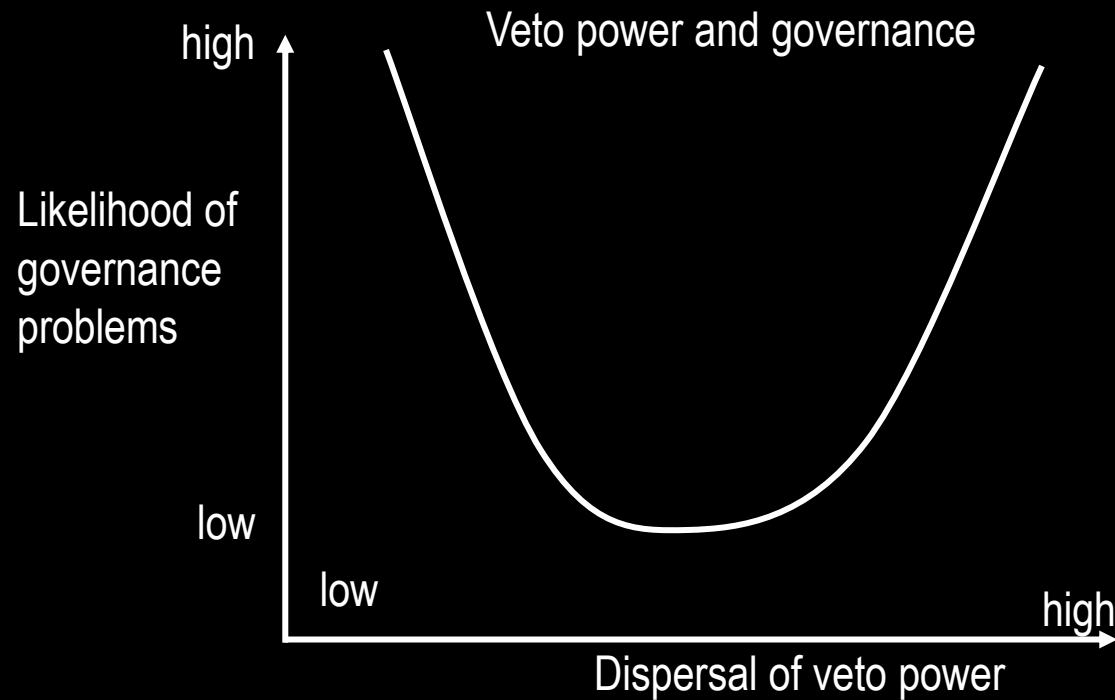
Keterangan Grafis ini sekaligus meralat grafis "Kompas", 15 Oktober 2009, tentang jumlah perolehan kursi parpol di DPR 2009-2014

■ Kursi di DPR

PERUBAHAN MENDASAR

Sejak Amandemen, DPR memiliki kewenangan yang luar biasa. Tidak hanya menjalankan fungsi ANGGARAN, PENGAWASAN dan LEGISLASI, DPR menentukan posisi strategis di Lembaga/Komisi Negara

VETO POWER



Andrew MacIntyre, *The Power of Institutions: Political Architecture and Governance*, Cornell, 2003

Kesimpulan

- UU Pemilu 2014 akan merubah perilaku aktor politik walau dampaknya belum dapat diketahui.
- Kemungkinan besar akan mirip dengan kondisi 2009.
- Rational-choice institutionalism hanya merubah perilaku aktor politik, bukan pemilih.